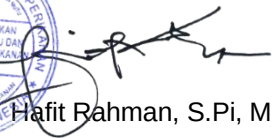
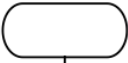
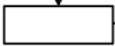
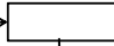
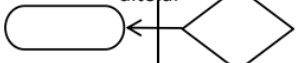
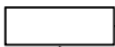


		Nomor SOP : 05/SOP/BKIPM.BDJ
		Tanggal pembuatan : 2 Januari 2023
		Tanggal revisi : -
		Tanggal efektif : 5 Januari 2023
		Disusun oleh : Tim PPID
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		Disahkan oleh Kepala Balai KIPM Banjarmasin   Hafit Rahman, S.Pi, MP
BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN		
BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN		
SOP Uji Konsekuensi		
Tujuan	Sebagai Pedoman dalam Uji Konsekuensi	
Dasar Hukum	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Permen KP No. PER.04/MEN/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Permen KP No. 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Prosedur (SOP) 5. Kepmen KP No. 81/KEPMEN-KP/SJ//2014 Tentang Klasifikasi Informasi Yang di kecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan KIP Nomor 1 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 7. Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	
Keterkaitan	– SOP Pendokumentasian Informasi – SOP Pengelolaan Permohonan Informasi – SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi	
Kualifikasi Pelaksana	a. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik b. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik c. Mempunyai communication skill d. Kemampuan Pendokumentasian Informasi	
Peringatan	Pencatatan dan Penggandaan Buku Tamu dan Daftar Pemohon	

SOP Uji Konsekuensi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Kementerian/ PPID Unit Kerja Eselon I	Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi	Atasan PPID Kementerian/P PID Unit Kerja Eselon I	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi KKP				dokumen informasi publik, peraturan perUUan	3 hari	konsep kajian	
2	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP				konsep kajian	1 hari	rekomendasi	
3	Apabila permohonan uji konsekuensi diterima, maka informasi publik akan dibuka. Apabila permohonan uji konsekuensi ditolak, maka informasi publik akan ditutup				dokumen informasi publik, peraturan perUUan	1 hari	surat penolakan	
4	Menyusun konsep keputusan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan, kemudian menyampaikan kepada Atasan PPID				Konsep SK	14 hari	Konsep Keputusan Atasan PPID/PPID	Dapat berupa Keputusan PPID
4	Menetapkan Keputusan untuk membuka atau menetapkan informasi yang dikecualikan				Konsep SK	1 hari	Keputusan Atasan PPID	